

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang bersifat satu kesatuan dan membentuk kelompok kehidupan, terdapat norma dan aturan yang mereka miliki dan patuhi, sehingga dapat menjadi dasar pada pembentukan kelompok manusia dengan memiliki ciri kehidupan yang khas<sup>1</sup>. Menurut para sosiolog masyarakat mempunyai bentuk-bentuk struktural seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan merupakan suatu bentuk aspek untuk mengubah kehidupan yang lebih baik serta lebih berguna bagi kehidupan manusia, dalam pembangunan terdapat banyak aspek yang melibatkan sumber daya. Setidaknya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat terutama masyarakat desa. Sebuah pembangunan ia selalu berhubungan atau berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan, dimana dalam perubahannya selalu mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar. Berbeda pula dengan pembangunan infrastruktur, secara singkat pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak terhadap kemajuan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan lokomotif perkembangan suatu daerah. Jika dipersiapkan secara matang tentu pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak positif bagi perubahan dari segi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar.

---

<sup>1</sup> M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 85.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 53.

Dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, diputuskan sebanyak 224 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus pada 3 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang serta pemerataan ekonomi. Sebanyak 224 proyek strategis nasional hanya tiga proyek bandar udara yang akan dibangun, salah satunya adalah Bandara Kediri. Pembangunan Bandara Kediri akan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT Gudang Garam Tbk. Serta pembangunan tersebut diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 5 triliun.<sup>3</sup>

Pembangunan infrastruktur sudah menjadi salah satu fokus pemerintah pusat, hal ini dibuktikan dengan pembangunan berbagai fasilitas umum salah satunya adalah bandara. Bandara Kediri termasuk dalam proyek strategi nasional, artinya proyek tersebut menjadi pembangunan yang diupayakan betul oleh pemerintah Indonesia. Karena pembangunannya yang mencakup infrastruktur dan fasilitas dianggap mampu mengakomodir mobilitas penduduk Indonesia, sehingga menghidupkan dan meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Proyek pembangunan bandara ini berlokasi di 4 desa di 3 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri, yakni Desa Bulusari di Kecamatan Tarokan, Desa Grogol di Kecamatan Grogol, Desa Jatirejo dan Desa Tiron di Kecamatan Banyakan. Proyek ini merupakan bukti pengembangan Kediri sebagai kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan Malang dan proyek ini juga tentu akan memberi dampak dan perubahan bagi wilayah sekitar Kediri dari berbagai aspek, mulai dari aspek sosial ekonomi, pendidikan atau aspek budaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agustiyanti, "Bandara Kediri Akhirnya Masuk Proyek Strategis Nasional", CNN indonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180727135824-92-317456/bandara-kediri-akhirnya-masuk-proyek-strategis-nasional>, 27 Juli 2018, diakses pada 10 November 2020.

<sup>4</sup> Budiman, Bendahara komunitas FPR, kantor sekertariat FPR, 8 September 2020.

Proses pembangunan Bandara Kediri sedikit terhambat ketika terdapat aksi penolakan pembangunan yang dilakukan oleh warga terdampak pembangunan bandara. Salah satunya adalah penolakan yang dilakukan oleh warga Dusun Pohpengker Desa Bulusari. Meski perlawanan yang dilakukan oleh warga Dusun Pohpengker tidak sama dengan perlawanan yang dilakukan komunitas FPR. Pada kasus perlawanan warga Dusun Pohpengker penolakan pembangunan tersebut pada dasarnya dilakukan karena pembangunan Bandara Kediri merambah ke masjid tua yang sudah ada sejak zaman dahulu. Masjid Al-Munsorifiyah yang ada di Dusun Pohpengker merupakan aset budaya serta salah satu masjid yang dinyatakan sebagai situs masjid tertua yang ada di Kabupaten Kediri.<sup>5</sup> Warga Dusun Pohpengker menyatakan sikap penolakan tegas atas kebijakan atau usaha dari pihak luar atau pihak dari pengembang bandara yang bertujuan untuk merelokasi situs wakaf Al- Munsorifiyah yang ada di Dusun Pohpengker Desa Bulusari tersebut. Selain karena Masjid Al- Munsorifiyah dianggap sebagai aset budaya, masjid tersebut juga dianggap warga sebagai simbol keagamaan yang dapat meningkatkan rasa semangat dalam melakukan proses beribadah.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pembangunan harus didasari pada aspek perubahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dibalik suksesnya pembangunan terdapat segelintir masyarakat yang mampu bertahan serta melakukan aksi perlawanan dalam rangka mencari keadilan serta mempertahankan aset-aset bersejarah. Konflik pembangunan Bandara Kediri tidak hanya terjadi pada situs masjid Dusun Pohpengker saja. Gejolak konflik juga terjadi di Dusun Pojok Desa Bulusari. Konflik ini didasari oleh upaya pengalihan makam yang mana makam tersebut

---

<sup>5</sup> Ali Mustofa, Ketua komunitas FPR, kediaman Ali Mustofa, 14 September 2020.

<sup>6</sup> Bayu, Bendahara komunitas FPR, warung di Dusun Pojok, 15 September 2020.

berdiri di atas tanah milik warga Dusun Pojok. Dalam hal ini pihak pengembang proyek bandara tengah memperluas pembebasan lahan yang ada di Dusun Pojok. Selain makam yang menjadi target perluasan lahan Bandara Kediri, perluasan tersebut juga menyasar ke lahan rumah dan sawah milik warga.<sup>7</sup> Pembangunan dan pembebasan lahan mulanya berjalan dengan lancar tanpa memicu adanya konflik. Pihak pengembang memberikan uang kompensasi tiga kali lipat dari harga tanah, mereka yang mempunyai lahan yang terkena dampak lantas tidak melakukan protes. Mereka menganggap bahwa uang kompensasi yang diberikan telah sepadan atau seimbang ketika pihak pengembang membeli tanahnya. Namun dalam proses pembelian tanah yang dilakukan oleh pihak broker dinilai tidak transparan, mereka melakukan pembelian tanah dengan cara diam-diam dan melakukan intervensi kepada pemilik tanah.<sup>8</sup> Intervensi kepada warga dilakukan ketika ada pihak yang tidak mau menjual tanah ke pihak pengembang.

Sebagai suatu sistem, masyarakat Dusun Pojok terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Terkait kondisi sosial masyarakat Dusun Pojok sendiri sebelum adanya pembangunan bandara terbagi menjadi tiga bagian, hal ini didasarkan pada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Dusun Pojok yaitu Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan Abangan. Ketiga bagian identitas berbasis sosial kultural keagamaan tersebut memang bisa berdampingan namun dirasa masih ada sekat-sekat yang membatasi interaksi sosial antara tiga bagian unsur tersebut. Ketika pembangunan bandara mulai berlangsung serta saat terjadi

---

<sup>7</sup> Supriyanto, Wakil Bendahara FPR, warung di Dusun Pojok, 15 September 2020.

<sup>8</sup> Ali Mustofa, Ketua komunitas FPR, kediaman Ali Mustofa, 14 September 2020.

gejolak konflik mulai terjadi yang disebabkan aktivitas pengukuran makam yang diinisiasi oleh pengembang, menariknya tiga identitas berbasis sosial kultural keagamaan tersebut bisa bersatu tanpa ada halangan sekat-sekat, mereka melakukan gerakan penolakan secara kolektif dan melakukan doa bersama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mempertahankan aset budaya makam. Secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwa aset budaya makam begitu penting bagi masyarakat Dusun Pojok dan mereka merasa mempunyai bertanggung jawab terkait pelestarian aset budaya tersebut.

Intervensi oleh pihak broker juga dilakukan ketika warga Dusun Pojok Desa Bulusari melakukan gerakan penolakan terhadap upaya pembangunan bandara yang akan dibangun di atas aset makam. Dalam hal ini tanah makam merupakan aset budaya bagi warga, namun tanah makam tersebut dimasukkan dalam area perluasan lahan bandara dan hendak dipindahkan oleh pengembang.

Gerakan perlawanan warga dusun pojok sempat memanas ketika warga mengetahui bahwa akan diadakan acara pemetaan atau pengukuran lahan makam yang dilakukan oleh pihak pengembang bandara, warga yang mendengar informasi tersebut bersama tokoh agama melakukan penjagaan terhadap aset makam untuk berjaga-jaga ketika ada pengukuran tanah makam yang dilakukan secara tidak transparan. Selain berjaga-jaga warga juga melakukan doa bersama serta melakukan aksi vandalisme di sepanjang jalan Dusun Pojok. Aksi vandalisme tersebut salah satunya bertujuan untuk meluapkan aspirasi terhadap penolakan relokasi makam yang ada di Dusun Pojok.

Momentum penolakan warga atas relokasi makam ini dinilai tepat untuk melahirkan sebuah komunitas yang melawan dan mengawal proses pembangunan

bandara. Filosofi terkait pemberian nama komunitas Forum Pojok Rembuk (FPR) ini adalah ketika mereka harus melakukan forum diskusi atau rembukan terkait gerakan yang akan dilakukan untuk menolak penggusuran tanah makam Dusun Pojok dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengadakan forum diskusi secara bersembunyi pada saat itu bukan tanpa alasan, intervensi dari aparat yang begitu kuat pada saat itu mengharuskan FPR melakukan forum diskusi dengan cara sembunyi dan berpindah-pindah tempat atau secara istilah dari tempat pojok ke tempat pojok lain. Terkait dengan penolakan FPR bukan hanya menolak pembangunan tanpa alasan, melainkan FPR harus mengawal pembangunan yang harus dilakukan secara transparan agar tidak menyalahi aturan dan merugikan masyarakat terdampak pembangunan bandara ini. Pembangunan yang dinilai masih terdapat kejanggalan dan tidak transparan ini membuat FPR merasa perlu adanya upaya advokasi, apalagi menyangkut tentang makam yang dinilai sebagai sebuah aset budaya.

Melalui pemaparan uraian latar belakang diatas penulis bermaksud untuk membuat penelitian dengan judul “Gerakan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan bandara (studi kasus perlawanan komunitas FPR dalam mempertahankan aset budaya terhadap pembangunan bandara di Dusun Pojok Kabupaten Kediri)”

## **B. Fokus Penelitian**

Melalui penjelasan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik gerakan perlawanan untuk mempertahankan aset budaya yang dilakukan oleh komunitas FPR (Forum Pojok Rembuk) ?

2. Apa faktor-faktor yang mendorong komunitas FPR (Forum Pojok Rembuk) melakukan gerakan perlawanan untuk mempertahankan aset budaya ?

C. Apa yang melatarbelakangi dan mendorong Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang dan pendorong komunitas FPR (Forum Pojok Rembuk) dalam melakukan gerakan perlawanan untuk mempertahankan aset budaya.

2. Untuk mengetahui praktik gerakan perlawanan untuk mempertahankan aset budaya yang dilakukan oleh komunitas FPR (Forum Pojok Rembuk).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi banyak pihak, diantara manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi dukungan terhadap penelitian sejenis dan memberikan kontribusi yang berdaya guna secara teoritis, metodologis dan empiris bagi kepentingan akademis.

2. Institusi Pemerintahan

Bagi pemerintah setempat dan pihak pembangunan bandara dapat memberi masukan dan saran terkait dukungan serta bantuan yang perlu diberikan kepada masyarakat terdampak pembangunan bandara agar tetap sejahtera dan juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan bandara Kediri.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang berjudul ” KETERLIBATAN NGO’s DALAM MENGADVOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA KULON PROGO” oleh Kirana Fika Dewi. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Dalam penelitian tersebut penulis fokus pada bagaimana peranan WALHI sebagai civil society dalam mengadvokasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur berupa bandara yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dari kelompok rentan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif terkait dinamika pembangunan bandara baru. Sumber data sekunder dalam penelitian tersebut diambil dari jurnal, literatur dan berita. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori keswadayaan atau kemandirian yang tinggi

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dari objek dari penelitian, dalam penelitian tersebut yang menjadi objek adalah isu lingkungan sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada objek isu aset budaya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) memiliki peran penting dalam proses advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Selain itu keadaan



dinamika sosial masyarakat terdampak pembangunan bandara menyebabkan ambivalensi antara masyarakat pro dan masyarakat kontra, selanjutnya dari sinilah timbul gerakan sosial dari masyarakat terdampak.<sup>9</sup>

Posisi penelitian ini dengan komparasi penelitian yang dilakukan oleh Kiran Fika Dewi menunjukkan perbedaan dalam segi fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada gerakan komunitas yang terbangun dari adanya dampak pembangunan bandara serta proses atau praktik gerakan komunitas yang mempertahankan aset budaya. Lebih jauh lagi perbedaan juga terletak pada basis teori yang digunakan, pada penelitian ini basis teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori gerakan sosial baru. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu penelitian elaboratif mengenai isu gerakan sosial, aset budaya maupun konflik dalam masyarakat.

2. Skripsi yang berjudul “KONFLIK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJP) DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN KETARJATI KABUPATEN MAJALENGKA” oleh Nok Elis. Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Surakarta tahun 2016. Dalam penelitian tersebut fokus lebih pada konflik yang terjadi antara masyarakat Sukamulya dengan Pemerintah Daerah terkait penolakan proses pembangunan bandara.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori konflik John

---

<sup>9</sup> Kirana Fika Dewi, “Keterlibatan NGO’s Dalam Mengadvokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Kulon Progo” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2019)

Galtung Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nok Elis adalah bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sukamulya penolak BIJB dengan pemerintah daerah terjadi disebabkan oleh faktor belum adanya sosialisasi, belum adanya harga ganti rugi yang jelas, relokasi dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. Sedangkan konflik yang terjadi antara masyarakat penolak dan pendukung BIJB disebabkan oleh perbedaan penilaian terhadap pembangunan proyek BIJB.<sup>10</sup>

Posisi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nok Elis adalah adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, jika Nok Elis hanya menggunakan teori konflik milik John Galtung maka penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan gerakan sosial untuk menganalisis. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada objek penelitian dimana penelitian Nok Elis menggunakan isu sosial ekonomi dimana masyarakat melawan karena belum adanya sosialisasi, belum adanya harga ganti rugi yang jelas, relokasi dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat sedangkan dalam penelitian ini lebih pada isu aset budaya berupa makam. Adapun kesamaannya adalah pada penggunaan metodologi yakni kualitatif. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu penelitian elaboratif mengenai isu gerakan sosial, aset budaya maupun konflik dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Nok Elis, "Konflik Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (JIJB) Di Desa Suka Mulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2016)

3. Skripsi yang berjudul “GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT MASYARAKAT PEGUNUNGAN KENDENG UTARA MELAWAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KABUPATEN REMBANG”

Ahmad Sufyan. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas tahun 2015. Dalam penelitian tersebut fokus terhadap gerakan sosial yang dilakukan masyarakat sebagai respon kebijakan pembangunan pabrik semen yang didasari dengan menghilangkan paham kedaulatan rakyat. Secara singkat penelitian tersebut mengulas dinamika gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pegunungan Kendeng Utara untuk menolak proses industrialisasi pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah gerakan sosial. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pegunungan Kendeng Utara didasari oleh kondisi sosial masyarakat yang berada dalam situasi struktural stain. Gerakan sosial masyarakatnya juga dikategorikan sebagai gerakan sosial yang bersifat sporadis, kemudian gerakan tersebut dikategorikan berhasil ketika masyarakat mampu dan berhasil melakukan aksi pemblokiran pabrik semen. Dengan kondisi bertambahnya kekuatan yang mendukung keberadaan pabrik semen tersebut menjadikan gerakan sosial yang sudah dilakukan terkesan seperti sia-sia.<sup>11</sup>

Adapun posisi penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan dalam isu yang melatarbelakangi adanya gerakan sosial, pada penelitian ini isinya lebih pada aset budaya berupa makam, sedangkan pada penelitian yang

---

<sup>11</sup> Ahmad Sufyan, “Gerakan Sosial Masyarakat-masyarakat Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang” (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015)

dilakukan oleh Ahmad Sufyan lebih pada terancamnya sumber mata pencaharian masyarakat atas adanya industrialisasi pabrik semen. Kemudian persamaan yang ada pada kedua penelitian terletak pada penggunaan metodologi dan juga teori yang digunakan untuk menganalisis. Meskipun pada penelitian ini tidak hanya menggunakan teori gerakan sosial, melainkan juga teori konflik Ralf Dahrendorf. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu penelitian kolaboratif mengenai isu gerakan sosial, aset budaya maupun konflik dalam masyarakat.